

NAMA PROYEK

Penguatan Kepemimpinan Perempuan Etnis Minoritas Cina Benteng untuk Membangun Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Mengintegrasikan Perspektif GEDSI di Perencanaan, Penganggaran, dan Pembangunan Desa

LATAR BELAKANG

Program ini diusulkan oleh PPSW Jakarta untuk memastikan komunitas Cina Benteng mendapatkan pengakuan dan akses yang membuka ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan. Tujuannya agar mereka dapat merepresentasikan kepentingannya serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Pemerintah merupakan pihak utama dalam pemenuhan hak-hak kelompok Cina Benteng, namun dalam pelaksanaannya diperlukan dukungan dan kontrol dari pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan kelompok Cina Benteng menjadi representasi strategis pemangku kepentingan untuk memastikan pemenuhan hak-hak etnis minoritas, khususnya perempuan, melalui perencanaan, penganggaran, dan program pembangunan yang berperspektif GEDSI.

Penerima manfaat dari program ini adalah perempuan Cina Benteng, etnis Tionghoa yang bermukim di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Mereka telah tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 1740, pasca-tragedi di Batavia. Akibat kebijakan kolonial, mereka diisolasi di daerah tersebut sehingga menyulitkan proses asimilasi. Hingga kini, komunitas ini masih mempertahankan adat-istiadat dan budaya leluhur, seperti meja abu, upacara tertentu, penggunaan tulisan Cina di atas pintu untuk menghalau roh jahat, serta pernikahan adat Cina "Ciatou".

Mengapa Fokus pada Perempuan? Komunitas perempuan Cina Benteng memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan penerimaan sosial, baik melalui interaksi sosial, pekerjaan rumah tangga, kegiatan sosial, maupun perkawinan silang. Namun, budaya patriarki Cina yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat menyulitkan mereka untuk tampil sebagai aktor perubahan. Perempuan Cina Benteng mengalami subordinasi karena dianggap sebagai pihak yang harus tunduk pada laki-laki: sebelum menikah mengikuti orang tua, setelah menikah mengikuti suami, dan ketika menjadi janda mengikuti anak.

Setiap kerusuhan anti-Cina berdampak lebih parah pada perempuan karena mereka mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Selain itu, perempuan Cina Benteng juga menanggung beban ganda: sebagai ibu rumah tangga yang juga harus mencari nafkah dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Kawin cerai tanpa akta nikah menyebabkan perempuan Cina Benteng tidak memiliki hak waris dan mengalami marginalisasi hukum.

TUJUAN

Tujuan Umum: Meningkatnya partisipasi perempuan Cina Benteng dalam perencanaan, penganggaran, dan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik yang berperspektif GEDSI.

Tujuan Khusus:

- Meningkatkan kapasitas PPSW Jakarta, pemimpin perempuan Cina Benteng, dan pemerintah daerah terkait GEDSI, monitoring, dan advokasi untuk membantu warga Cina Benteng mengakses layanan identitas hukum, jaminan sosial, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

- Memperkuat kapasitas pemimpin perempuan Cina Benteng untuk membangun kekuatan kolektif, terlibat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang inklusif, serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan.
- Mengembangkan usaha mikro perempuan Cina Benteng secara kolektif, berbasis digital dan kelembagaan ekonomi berbentuk koperasi yang demokratis dan berperspektif GEDSI.

WILAYAH KERJA

Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

FOKUS PROGRAM

Penguatan Kepemimpinan Perempuan: Melalui pengorganisasian dan peningkatan kesadaran kritis agar perempuan Cina Benteng dapat melakukan aksi kolektif dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Advokasi dan Lobi: Menggunakan data berbasis desa untuk memperkuat isu GEDSI terkait layanan sosial, pemulihan ekonomi, dan partisipasi politik etnis minoritas. Advokasi dilakukan melalui forum musyawarah perempuan desa, forum desa, dan forum multistakeholder tingkat kabupaten.

Pengembangan Pengetahuan dan Diseminasi Pembelajaran: Berbasis pengalaman dari program ESTUNGKARA-INKLUSI dan PEDULI, memperluas jangkauan partisipasi warga Cina Benteng.

Intervensi akan diawali dengan pembangunan data desa berperspektif GEDSI dan data dampak pandemi terhadap komunitas. PPSW Jakarta akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok Cina Benteng untuk memasukkan perspektif GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.

Program ini mendukung pencapaian RPJMN, khususnya peningkatan kualitas perempuan dan anak, serta tujuan SDGs 1 dan 3 (target 3, 7, dan 8), yaitu memastikan seluruh masyarakat, khususnya yang miskin dan rentan, memiliki hak atas sumber daya ekonomi dan layanan dasar.

MITRA KERJA

- a. Pemerintah Kabupaten Tangerang:
 - Dinas P3A
 - Dinas Dukcapil
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Koperasi & UMKM
 - DPMPD
 - Bappeda
- b. Pemerintah Desa Belimbing
- c. FITRA Jabar

ANGGARAN

Tahun 2022: Rp 490.365.000

Tahun 2023: Rp 550.000.000

Tahun 2024: Rp 586.000.000

Tahun 2025: Rp 600.000.000

DURASI PROGRAM

Fase I: 2022 – 2025

Fase II: 2026 – 2028

DOKUMEN TERKAIT

https://drive.google.com/drive/folders/1_OsnD-b4MCLezZuAx-P4FrVK3GtRUWht?usp=drive_link